

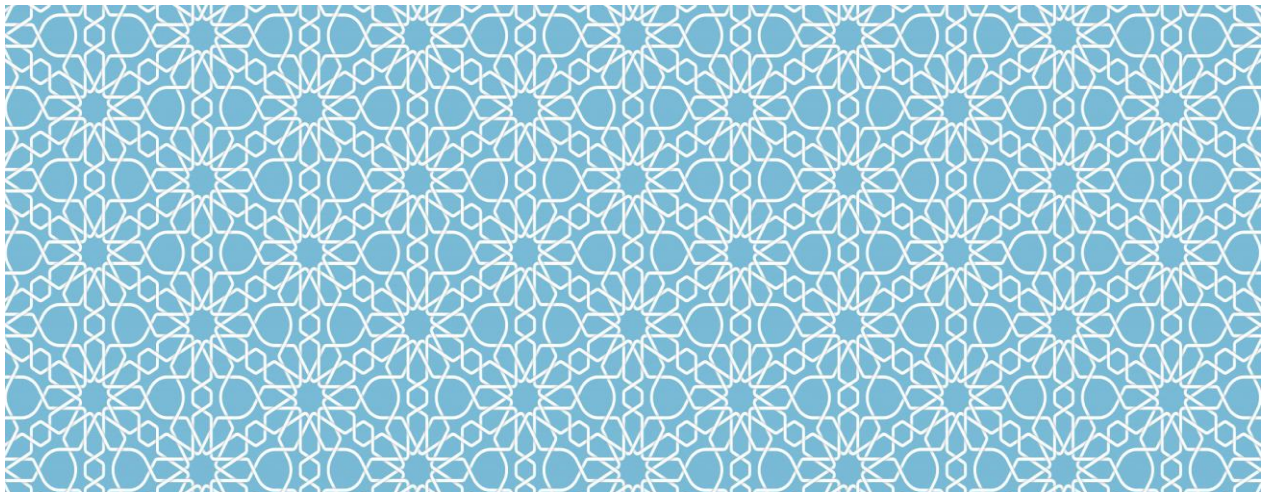


**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI  
BULAN JANUARI 2019**

**Disusun Oleh  
Badan Pelaksana  
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)**

**Disampaikan kepada  
Dewan Pengawas**

**Jakarta, 28 Februari 2019**



# **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BULAN JANUARI 2019**

## **I. Dasar Hukum**

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Bulan Januari 2019 merupakan amanah dari:

1. Pasal 52 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji,
2. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji,
3. Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan
4. Pasal 10 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, Badan Pelaksana BPKH diwajibkan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

## **II. Tujuan**

Tujuan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, meliputi antara lain:

1. Memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana.
2. Melakukan analisis dan evaluasi mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana dalam pengelolaan keuangan haji.

## **III. Laporan Kinerja**

Sepanjang bulan Januari 2019, secara umum masing-masing bidang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKAT yang direncanakan. Kinerja BPKH secara institusi selama bulan Januari 2019 untuk sementara ini belum dapat dipotret karena pencapaian dan penyerapan anggaran masih sangat sedikit. Potret kinerja BPKH *wide* diperkirakan akan dapat terwakili paling tidak pada saat laporan triwulan pertama pada bulan Maret 2019.

Selanjutnya, berikut dipaparkan laporan pelaksanaan kegiatan per bidang.

### **3.1. Kinerja Bidang Hukum dan Kepatuhan**

Bidang Hukum dan Kepatuhan selama Bulan Januari tahun 2019 sudah melaksanakan 8 (delapan) kegiatan dengan realisasi *output* sebesar 22,92% dengan penyerapan anggaran sebesar 2,83%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Penyusunan Peraturan BPKH dan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
2. Review Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji.
3. Perumusan SOP Bidang Hukum dan Kepatuhan.
4. Review dan tindak lanjut UU 34/2018, PP No 5/2018, dan Perpres 110/2018.
5. Kegiatan untuk melakukan Kontrak-Kontrak Investasi.
6. Perumusan Peraturan Perundangan Antar Lembaga.
7. Penyusunan Program Kepatuhan.
8. Pembuatan sistem dan Pelaksanaan Program *Whistleblowing*.

Secara rinci kegiatan bidang Hukum dan Kepatuhan disampaikan pada lampiran.

Keterangan atau kendala bidang Hukum dan Kepatuhan selama bulan Januari 2019 adalah:

1. Pemrakarsa belum menginisiasi rencana penyusunan PBPKH dikarenakan petunjuk teknis dan SOP pembentukan PBPKH masih dalam finalisasi.
2. Sedang dilaksanakan *review* PBPKH No 10, sesuai masukan Dewan Pengawas.
3. Masih dalam proses pembahasan internal dan revisi.
4. BPKH akan berkoordinasi dengan kementerian terkait (Sekretariat Negara, Menkumham, dan Kemenag).
5. Konsep transaksi bisnis kontrak investasi yang diajukan masih dalam proses pengkajian.
6. Proses koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan dan rencana pembentukan *task force* bersama antara BPKH dan LPS.
7. Telah dilakukan konsinyering pada tanggal 11-13 Januari 2019.
8. Sistem sudah mulai dipasang di *website* dan sedang dalam tahap penyesuaian aplikasi, sesuai SOP yang disusun serta akan dilaksanakan pengujian terhadap sistem yang ada sebelum *dilaunching*. Untuk NDA dari Kemenkeu belum diterima sehingga belum dapat dilaksanakan penandatanganan NDA.

Rencana kegiatan Bidang Hukum dan Kepatuhan pada Bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan BPKH dan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
2. *Review* Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji.
3. Perumusan SOP bidang hukum dan kepatuhan.
4. Penyediaan *external counsel* untuk investasi langsung.
5. Penyediaan *external counsel* untuk *long term lease*.
6. Kegiatan untuk melakukan kontrak-kontrak investasi.
7. Penyusunan program kepatuhan.
8. Pembuatan sistem dan pelaksanaan program *whistleblowing*.

### **3.2. Kinerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan**

Bidang Perencanaan dan Pengembangan selama Bulan Januari 2019 sudah melaksanakan 4 (empat) kegiatan dengan realisasi *output* sebesar 12,40% dan penyerapan anggaran sebesar 0,27%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan.
2. Penyusunan Tata Cara Pengusulan dan SOP RKAT BPKH.

3. Kerjasama Kajian Keuangan Haji dengan Perguruan Tinggi dan Komunitas Ekonomi Syariah.
4. Penyusunan Model dan Aplikasi *Balanced Score Card*.

Secara rinci kegiatan bidang Perencanaan dan Pengembangan disampaikan pada lampiran.

Hasil atau output yang dicapai oleh bidang Perencanaan dan Pengembangan selama bulan Januari 2019 adalah:

1. *Output* kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah berupa Laporan Pertanggungjawaban PPKH BPKH Tahun 2018, draft SOP pengusulan RKAT, dan pelaksanaan Diseminasi Kajian Keuangan Haji Tahun 2018.
2. Tahapan kegiatan BSC saat ini telah diketahui pemenang lelangnya, yaitu PT. GML *Performance Consulting*, dan akan dilaksanakan *kick off meeting* pada tanggal 06 Maret 2019.

Kegiatan *non budgetary* yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan selama Bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Memo Penetapan Batas Harga HPS Lelang Valas.
2. Kajian Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
3. Kajian Asuransi Kesehatan Karyawan BPKH.
4. Kajian Asuransi Purna Jabatan.
5. Kajian Asuransi Haji.

Rencana Kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan.
2. Penyusunan Tata Cara Pengusulan dan SOP RKAT BPKH.
3. Penyempurnaan model dan aplikasi *BPKH Islamic Investment Update*.
4. Penyusunan model dan aplikasi penilaian kinerja BPKH.
5. Kerjasama Kajian Keuangan Haji dengan Perguruan Tinggi dan Komunitas Ekonomi Syariah.

### 3.3. Kinerja Bidang Keuangan

Bidang Keuangan selama Bulan Januari 2019 sudah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi *output* sebesar 31,67% dan penyerapan anggaran sebesar 0%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Aplikasi Laporan Harian Posisi Dana BPS BPIH.
2. Penyusunan SOP Pengadaan Valas.
3. Pengembangan dan Pelatihan SDM Bidang Keuangan.

Secara rinci kegiatan bidang Keuangan disampaikan pada lampiran.

Beberapa catatan atas pelaksanaan kegiatan pada bidang Keuangan selama bulan Januari 2019 adalah:

1. Sedang dilaksanakan evaluasi terhadap aplikasi Laporan Harian 2018
2. Dikarenakan sudah mendesaknya kebutuhan akan likuiditas valas untuk kebutuhan Penyelenggaraan Ibadah Haji maka SOP ini telah disusun secara

Internal oleh Divisi Tresuri dan Pengendalian Keuangan dengan sebelumnya telah mendapatkan masukan dari Internal Audit dan Divisi Risiko Bisnis Bidang Manajemen Risiko. Karena proses dilakukan secara internal untuk kecepatan menghasilkan *output* maka anggaran belum terserap. Namun demikian, Bidang Keuangan tetap akan mengadakan kegiatan FGD untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terkait SOP ini pada bulan Februari 2019.

Rencana Kegiatan Bidang Keuangan pada Bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP Pengadaan Valas.
2. Pembuatan Aplikasi Laporan Harian Posisi Dana BPS BPIH.

### **3.4 Kinerja Bidang Investasi**

Bidang Investasi selama Bulan Januari 2019 sudah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi *output* sebesar 66,76% dan penyerapan anggaran sebesar 50,30%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Portofolio Investasi.
2. Penyusunan Proposal Kelayakan Investasi.
3. Penjajakan Pengadaan Hotel/*Catering* Jamaah Haji di Arab Saudi.

Secara rinci kegiatan bidang Investasi disampaikan pada lampiran

Kegiatan *Non Budgetary* yang dilaksanakan oleh bidang Investasi selama Bulan Januari 2019 adalah *meeting one on one* dengan Manajer Investasi.

Rencana Kegiatan bidang Investasi pada Bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kajian penempatan Investasi Surat Berharga di RD Terproteksi.
2. Perumusan Kebijakan Finansial BPKH di masa depan (FGD Pedoman, SOP Investasi, Potensi Pembebasan Pajak bagi BPKH dengan A1, dan FGD *Income Smoothing* dengan DSN MUI)
3. Pelatihan employee dan anggota (Manajemen Risiko dan Syariah Investment Training) (*non budget*).
4. Penempatan dana investasi (*non budget*).

### **3.5. Kinerja Bidang SDM dan Kemaslahatan**

Bidang SDM dan Kemaslahatan selama bulan Januari 2019 sudah melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan dengan realisasi *output* sebesar 39,46% dan penyerapan anggaran sebesar 3,54% Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Gathering Pegawai (Team Building)
2. Realisasi Hak Keuangan
3. Penyusunan Program Prioritas & Studi Banding Program Kemaslahatan
4. Sistem Informasi Manajemen Kemaslahatan
5. Operasional Implementasi
6. Pengadaan Jasa Sewa Kantor dan Kendaraan Operasional Kantor
7. Penyediaan Barang & Jasa dan Inventaris Kantor

Secara rinci kegiatan bidang SDM dan Kemaslahatan disampaikan pada lampiran.

Beberapa yang menjadi *concern* bidang SDM dan Kemaslahatan untuk pelaksanaan kegiatan selama bulan Januari 2019 adalah:

1. Penetapan prioritas dan tim koordinasi memerlukan pertemuan antara Kepala BPKH dengan Dirjen PHU & Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.
2. Perlu survei lebih lanjut calon penyedia untuk memenuhi kebutuhan aplikasi sistem informasi manajemen kemaslahatan.
3. Terbatasnya personil yang ada dan fokus kegiatan banyak mensupervisi proposal dari perwakilan masyarakat, sehingga sering terjadi benturan waktu.
4. Proposal yang masuk masih banyak yang tertanggal bulan Desember 2018, seharusnya sudah menggunakan tahun periode Januari 2019. Proposal tersebut belum dapat diproses. Kelengkapan proposal yang disampaikan oleh calon pemohon seringkali tidak memenuhi persyaratan PBPBH 7/2018.
5. Untuk Barjas, waktu yang terlalu singkat untuk pengadaan sewa gedung 2019 sehingga dilakukan perpanjangan sewa Graha MR 21

Rencana Kegiatan bidang SDM dan Kemaslahatan pada Bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Diklat (*Training Need Analysis*).
2. Pelaksanaan Diklat.
3. Kajian dan Penyediaan Aplikasi Kepegawaian (*HRIS & Payroll Software*).
4. Finalisasi Draft Prioritas Program Kemaslahatan tahun 2019 dengan penandatanganan MOU dan Penetapan Tim Koordinasi Prioritas Kegiatan untuk Program Kemaslahatan tahun 2019.
5. Finalisasi Rancangan SOP Pengelolaan Program Kemaslahatan.
6. Persiapan pembuatan aplikasi kemaslahatan.
7. Evaluasi rutin proposal kemaslahatan yang masuk.
8. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kegiatan Kemaslahatan kepada para *stakeholder*.
9. Pengadaan Jasa Sewa Kantor dan Kendaraan Operasional Kantor.
10. Penyediaan Barang & Jasa dan Inventaris Kantor.

### **3.6. Kinerja Bidang Operasional**

Bidang Operasional selama Bulan Januari 2019 sudah melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan realisasi *output* sebesar 35,57% dan penyerapan anggaran sebesar 29,78%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Rapat Koordinasi dengan BPS BPIH dan Promosi, Monitoring dan Evaluasi BPS BPIH

Secara rinci kegiatan bidang Operasional disampaikan pada lampiran.

Pada umumnya, proses pencapaian target *output* pada Bidang Operasional tidak menemukan kendala yang signifikan.

Rencana Kegiatan bidang Operasional pada Bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi dengan BPS BPIH.
2. Promosi, Monitoring dan Evaluasi BPS BPIH.
3. Kebijakan terkait dengan *Virtual Account*.

### 3.7. Kinerja Bidang Manajemen Risiko

Bidang Manajemen Risiko selama Bulan Januari 2019 sudah melaksanakan 5 (lima) kegiatan dengan realisasi *output* sebesar 11,50% dan penyerapan anggaran sebesar 0,88%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Otomasi *Dashboard* Manajemen Risiko.
2. *Business Continuity Management* (BCM).
3. *Crisis Management Center* (CMC).
4. Sertifikasi ISO 9001: 2015.
5. Penyusunan Pedoman dan Prosedur Tata Kerja Bidang Manajemen Risiko.

Secara rinci kegiatan bidang Manajemen Risiko disampaikan pada lampiran.

Salah satu pencapaian dari pelaksanaan kegiatan pada Bidang Manajemen Risiko selama bulan Januari 2019 adalah bahwa Pedoman dan Prosedur Tata Kerja Bidang Manajemen Risiko sudah dihasilkan draft pedoman dan disampaikan ke A1 melalui Memo tanggal 31 Januari 2019.

Kegiatan *non budgetary* yang dilaksanakan oleh Bidang Manajemen Risiko selama bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman dan Prosedur Analisis Risiko Pelaksanaan Investasi Surat Berharga.
2. Penyusunan Pedoman dan Prosedur Analisis Risiko Pelaksanaan Investasi Langsung.
3. Penyusunan Pedoman dan Prosedur Analisis Risiko atas Pelaksanaan Penempatan.
4. Studi Banding PT. TASPEN.
5. Studi Banding BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menyusun Laporan Kinerja Manajemen Risiko Tahun 2018.
7. Kajian Pedoman Teknis Pengadaan Valuta Asing.
8. Kajian Manajemen Risiko atas Pembelian Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Listrik Negara (SIB III PLN).
9. Kajian Manajemen Risiko Atas Permohonan Persetujuan Investasi BPKH pada Pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Republik Indonesia senilai Rp6 T.
10. Kajian Manajemen Risiko atas Investasi Langsung Dapur *Catering* Jamah Haji dan Umrah di Arab Saudi.
11. Kajian Manajemen Risiko atas Permohonan Persetujuan Investasi BPKH pada Investasi Lainnya Berupa Kontrak Tahun Jamak Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi.
12. Pemenuhan Permohonan Data Pemenuhan Kriteria BPS BPIH Likuiditas.
13. Pemenuhan Kajian Manajemen Risiko atas Usulan Penambahan Fungsi PT. Bank Permata,Tbk. (Unit Usaha Syariah) sebagai BPS BPIH Mitra Investasi dan Pengelola Nilai Manfaat.
14. Pemenuhan Kajian Manajemen Risiko atas Usulan Penambahan Fungsi PT. Bank Mega Syariah sebagai BPS BPIH Likuiditas.
15. Pemenuhan Kajian Manajemen Risiko atas Usulan Penambahan Fungsi PT. CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah) sebagai Pengelola Nilai Manfaat.

16. Pemenuhan Kajian Manajemen Risiko atas Usulan Penambahan Fungsi PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. (Unit Usaha Syariah) sebagai BPS BPIH Likuiditas.
17. Pemenuhan Kajian Manajemen Risiko atas Usulan Penambahan Fungsi PT. Bank Muamalat Tbk, sebagai BPS BPIH Mitra Investasi, Likuiditas dan Pengelola Nilai Manfaat.
18. Pemenuhan Kajian Manajemen Risiko atas Usulan Penambahan Fungsi PT. BPD Jawa Tengah (Unit Usaha Syariah) sebagai Pengelola Nilai Manfaat.
19. Pemenuhan Kajian Manajemen Risiko atas Usulan Penambahan Fungsi PT. BPD Jambi (Unit Usaha Syariah) sebagai BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat, Penerima, Likuiditas dan Operasional BPKH.
20. Pemenuhan Kajian Manajemen Risiko atas Usulan Penambahan Fungsi PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk sebagai BPS BPIH Likuiditas dan Mitra Investasi.
21. Pemenuhan Kajian Manajemen Risiko atas Usulan Penambahan Fungsi PT. BPD Sumatera Barat (Unit Usaha Syariah) sebagai BPS BPIH Likuiditas, Mitra Investasi dan Pengelola Nilai Manfaat.

Rencana Kegiatan bidang Manajemen Risiko pada Bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Business Continuity Management (BCM).
2. ISO 9001: 2015 untuk Proses Audit Internal.
3. Penyusunan Pedoman dan Prosedur Tata Kerja Bidang Manajemen Risiko (Non Anggaran).
4. Penyusunan Pedoman dan Prosedur Analisis Risiko Pelaksanaan Investasi Surat Berharga (Non Anggaran).
5. Penyusunan Pedoman dan Prosedur Analisis Risiko Pelaksanaan Investasi Langsung (Non Anggaran).
6. Penyusunan Pedoman dan Prosedur Analisis Risiko atas Pelaksanaan Penempatan (Non Anggaran).
7. Menyusun *Risk Register* (Non Anggaran).
8. Menyusun *Risk Profile* (Non Anggaran).
9. Kajian Investasi (sesuai permintaan /kebutuhan Bidang Investasi) (Non Anggaran)
10. Kajian Penempatan (sesuai permintaan /kebutuhan Bidang Penempatan) (Non Anggaran).

### **3.8. Kinerja Audit Internal**

Audit Internal selama Bulan Januari 2019 sudah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi *output* sebesar 7,34% dan penyerapan anggaran sebesar 1,46%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Standarisasi Kebijakan, Pedoman Audit Sesuai dengan IIA dan *Tools* Audit Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan.
2. Pelaksanaan Audit Umum.
3. Tindak Lanjut Program *Whistleblowing System*.

Secara rinci kegiatan Audit Internal disampaikan pada lampiran.



Keterangan atau kendala bidang Audit Internal selama bulan Januari 2019 adalah bahwa dokumen yang diperlukan konsultan terkait dengan penyusunan standarisasi kebijakan audit, manajemen audit, pedoman audit seperti kebijakan akuntansi, pedoman penyusunan laporan keuangan, sistem akuntansi, pedoman penyusunan RKAT, dan *audit charter* masih dalam proses penyusunan.

Kegiatan Non *Budgetary* yang dilaksanakan oleh Audit Internal selama Bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Finalisasi Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Finalisasi *Audit Charter*.
3. Tindak Lanjut Temuan BPK.
4. Pemberian Masukan Kebijakan.
5. Reviu atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2018.

Rencana Kegiatan bidang Audit Internal pada Bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Standarisasi Kebijakan, Pedoman Audit Sesuai dengan IIA dan Tools Audit.
2. Pelaksanaan Audit Umum.
3. Tindak Lanjut Program *Whistleblowing System*.
4. Reviu atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2018.
5. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.
6. Legalisasi *Audit Charter*.
7. Tindak Lanjut Temuan BPK.
8. Pendampingan Audit BPK.

### **3.9. Kinerja Sekretariat Badan**

Sekretariat Badan selama Bulan Januari 2019 sudah melaksanakan 5 (lima) kegiatan dengan realisasi *output* sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 24,01%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Aplikasi Kesekretariatan.
2. Cadangan Perjalanan Dinas BPKH.
3. Kerjasama Kelembagaan BPKH.
4. Kesekretariatan Lainnya.
5. Kegiatan *Media Briefing*.

Secara rinci kegiatan Sekretariat Badan disampaikan pada lampiran.

Rencana Kegiatan Sekretariat Badan pada Bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Aplikasi Kesekretariatan.
2. Kerjasama Kelembagaan.

### **3.10. Kinerja Sekretariat Dewan Pengawas**

Sekretariat Dewan Pengawas selama Bulan Januari 2019 sudah melaksanakan 5 (lima) kegiatan dengan realisasi *output* sebesar 7,34% dan penyerapan anggaran sebesar 1,46%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Dewan Pengawas/Layanan Kesekretariatan lainnya.
2. Sekretariat Dewan Pengawas/Rapat-rapat.

3. Pengawasan Bidang Keuangan/Monev & Koordinasi Komite Audit dengan bidang pengendalian internal (internal audit).
4. Pengawasan Bidang Investasi & Penempatan/Pengawasan dan Pemeriksaan Nilai Manfaat.
5. Pengawasan Bidang ManRisk/Monitoring & Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Risiko pada masing Bidang Badan Pelaksana.

Secara rinci kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas disampaikan pada lampiran.

Rencana Kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas pada Bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Rapat – rapat.
2. Monev & Koordinasi Komite Audit dengan bidang pengendalian internal (internal audit).
3. Monitoring Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan.
4. Evaluasi Pelaporan dan Kinerja Investasi.
5. Evaluasi Pelaporan dan Kinerja Penempatan.
6. Pengawasan dan Pemeriksaan Nilai Manfaat.
7. Pengembangan Pengawasan dan *Market Review/Market Update*.
8. Pemantauan Efektivitas IT termasuk VA (*Virtual Account*).
9. Monitoring & Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Risiko pada BPS BPIH.
10. Monitoring & Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Risiko pada masing-masing Bidang Badan Pelaksana.
11. Penyempurnaan Dashboard Pengawasan.
12. Pengawasan Pengelolaan Risiko melalui *Whistle Blowing System* (WBS).